

Komparasi Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah

Hendrik Suryadi

Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Palangka Raya

Alexandra Hukom

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Palangka Raya

Jl. Yos Sudarso, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Korespondensi Penulis : suryadihendrik35@gmail.com

Abstract : This research aims to determine and analyze the comparative development of local revenue (PAD), general allocation funds (DAU) and regional expenditure in Central Kalimantan province. The variables used in this research are PAD, DAU and regional expenditure. This research uses a quantitative descriptive method using the One Way Anova analysis technique using SPSS software and obtains normality test results, homogeneity tests and one way Anova test results. The data used is secondary data sourced from the APBD posture, Central Kalimantan TKKD posture in the 2018-2022 period, from the internet, books and supporting journals in this research.

Keywords: Original Regional Income, General Allocation Funds, Regional Expenditures

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis komparasi perkembangan pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan belanja daerah di provinsi Kalimantan tengah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, DAU dan belanja daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Teknik analisa One Way Anova menggunakan software SPSS dan mendapatkan hasil uji normalitas, uji homogenitas dan hasil uji one way anova. data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari postur APBD, postur TKKD Kalimantan tengah pada periode tahun 2018-2022, dari internet, buku dan jurnal pendukung dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah

LATAR BELAKANG

Provinsi Kalimantan Tengah 14 pemerintahan daerah yaitu kota palangka raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung :Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Sukamara.

Provinsi Kalimantan Tengah, yang terletak di tengah Pulau Kalimantan, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan PAD. Di sisi lain, DAU yang merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, memiliki peran signifikan dalam mendukung anggaran belanja daerah. Belanja daerah sendiri mencerminkan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang seharusnya diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi regional merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan sebuah negara. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika PAD, DAU, dan Belanja Daerah antar kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dalam periode 2018-2022.

PAD kalimantan tengah sejak tahun 2018 mengalami lonjakan peningkatan dan berhasil melampaui target dari target PAD sebesar 1,4 Triliun capaian sampai dengan 31 desember 2018 adalah sebesar 1,6 Triliun, dengan persentase capaian sebesar 115%. dengan kenaikan ini, juga berdampak pada pendapatan secara keseluruhan, dari target 4,4 T terjadi peningkatan sebesar 4,6 T dengan persentase sebesar 106%. Dari total keseluruhan terjadi surplus PAD sebesar 15,2% dan total pendapatan secara keseluruhan sebesar 6,06%. Penyumbang kontribusi terbesar diantaranya adalah dari hasil pajak kendaraan bermotor, terjadi capaian sebesar 108%, kemudian pajak bahan bakar terjadi kenaikan sebesar 145% dengan surplus 573 Milyar. Begitupula target pendapatan daerah tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup besar dari 4,4 T di tahun 2018 menjadi 5,1 T di tahun 2019 dengan peningkatan sebesar 733 Milyar atau 16,8% sehingga PAD terbesar di kalimantan tengah terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,2 T.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai denganimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Menurut pasal 2 Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah kalimantan tengah berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum antar Kabupaten/Kota 2018-2022 meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang “Komparasi Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah di Provinsi kalimantan tengah” untuk melihat sejauh mana perkembangan APBD dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan selanjutnya dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah dengan perumusan masalah Bagaimana Komparasi dan Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah di Provinsi kalimantan tengah.

KAJIAN TEORITIS

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan, 2002).

(Menurut mawarni 2013) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pendapatan asli daerah (PAD)

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan menurut kementerian keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

(Menurut jefri alfian sinaga 2020) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dana alokasi umum (DAU)

(Puput sadiyah 2020) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalokasikannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah.

(Menurut jefri alfian sinaga 2020) dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Belanja daerah

(Menurut puput sadiyah 2020) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan metode analisis one way anova dengan menggunakan *softwere IBM SPSS* dengan meneliti komparasi perkembangan pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan belanja daerah di provinsi kalimantan tengah. (Menurut wiwin yuliani 2018) deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari data postur APBD dan postur TKDD SIMTRADA provinsi Kalimantan tengah, buku-buku, jurnal, internet, dan sumber data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

(Menurut faroh ladaya 2023) Metode one way anova adalah salah satu metode statistika yang digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok data. One Way

Anova mampu menguji kemampuan dari signifikansi hasil penelitian. Metode ini telah diterapkan pada banyak penelitian termasuk penelitian tentang pendidikan. (Menurut puput sadiyah 2020) kemadirian suatu daerah dalam mengatur otonomi daerah dapat dilihat berdasarkan komparasi dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah, sehingga dengan melakukan komparasi dapat diketahui ada perbedaan di Provinsi kalimantan tengah.

HASIL PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tests of Normality							
kelompok	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.	
skor	PAD	.313	5	.122	.840	5	.165
	DAU	.338	5	.063	.775	5	.050
	BD	.233	5	.200 [*]	.901	5	.417

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel 1 menunjukkan hasil uji normalitas sebagai syarat asumsi pengujian komparatif dan mendapatkan hasil nilai pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan belanja daerah (BD) signifikan lebih besar dari nilai 0,05 maka dapat diartikan data berdistribusi secara normal atau syarat uji normalitas sudah terpenuhi.

Uji Homogenitas dan Uji Anova

→ Oneway

Test of Homogeneity of Variances				
skor	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
	3.177	2	12	.078

ANOVA					
skor	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	276085.200	2	138042.600	1.994	.179
Within Groups	830708.800	12	69225.733		
Total	1106794.000	14			

Tabel 2 menunjukkan hasil uji homogenitas. (Menurut puput sadiyah 2020) Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah suatu varians (keberagaman) data dari dua atau lebih kelompok bersifat homogen (sama) atau heterogen (tidak sama). Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas adalah apabila signifansi uji homogenitas $> 0,05$, maka data

tersebut homogen (sama). Berdasarkan hasil nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka syarat uji homogenitas terpenuhi.

Gambar 3 uji anova menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat diartikan tidak ada perbedaan antara PAD, DAU dan BD secara signifikan.

Uji One Way Anova

		Dependent Variable: skor		Bonferroni		
(I) kelompok	(J) kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PAD	DAU	309.00000	166.40401	.264	-153.5155	771.5155
	BD	260.40000	166.40401	.431	-202.1155	722.9155
DAU	PAD	-309.00000	166.40401	.264	-771.5155	153.5155
	BD	-48.60000	166.40401	1.000	-511.1155	413.9155
BD	PAD	-260.40000	166.40401	.431	-722.9155	202.1155
	DAU	48.60000	166.40401	1.000	-413.9155	511.1155

Tabel 4 hasil uji one way anova menjelaskan jika hasil signifikan lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan secara nyata dan jika hasil signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan secara nyata. Dan hasil dari tabel 4 nilai signifikan pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan belanja daerah (BD) mendapatkan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan kalau tidak adanya perbedaan secara nyata antara ketiga variable tersebut alias sama.

Kalimantan tengah berada pada urutan ke 5 dalam realisasi belanja APBD, dan berada pada urutan ke-8 realisasi pendapatan APBD se Indonesia pada puncaknya tahun 2022. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masuk sepuluh besar Realisasi Belanja APBD dan Realisasi pendapatan APBD tahun anggaran 2022, per laporan realisasi tanggal 11 Juni 2022. Data tersebut sesuai rilis Kemendagri dalam rapat percepatan realisasi APBD yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro secara virtual yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia yang didampingi kepala perangkat daerah tahun 2022. Kalimantan tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, optimalisasi menggali pendapatan asli daerah harus disertai dengan langkah dan kebijakan strategis serta inovasi yang terbarukan, agar pendapatan asli daerah diperoleh bagi daerah secara maksimal, yang pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat.

Sebagaimana rilis Kemendagri tanggal 20 Juni 2022, bahwa persentase realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia TA. 2022, provinsi kalimantan tengah masuk 10 besar se-Indonesia yakni berada di urutan 8 dengan capaian 36,70%. Secara urut presentase capaian realisasi pendapatan APBD se Indonesia, provinsi kepulauan bangka belitung berada di urutan

pertama dengan capaian 44,69%, provinsi banten berada di urutan kedua dengan capaian 41,43%, provinsi sumatera barat berada di urutan ketiga dengan capaian 39,71%, provinsi sumatera utara berada di urutan keempat dengan capaian 38,39%, provinsi jawa barat berada di urutan kelima dengan capaian 38,35%, provinsi sulawesi selatan berada di urutan keenam dengan capaian 37,99%, provinsi kalimantan timur berada di urutan ketujuh dengan capaian 36,74%, provinsi kalimantan tengah berada di urutan delapan dengan capaian 36,70%, provinsi jawa timur berada di urutan sembilan dengan capaian 36,00% dan provinsi aceh berada di urutan kesepuluh dengan capaian 35,69%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Didapatkan Hasil uji normalitas berdistribusi secara normal, Hasil uji homogenitas varian data homogen, hasil uji anova tidak ada perbedaan yang signifikan antara PAD, DAU dan Belanja Daerah dan hasil uji one way anova tidak ada perbedaan secara nyata antara PAD, DAU dan Belanja Daerah di provinsi kaliamantan tengah dalam kurun waktu periode tahun 2018-2022. Tetapi puncak APDB tertinggi di kaliamantan tengah terdapat pada tahun 2022 dan memasuki urutan terbesar ke 8 se-indonesia dengan capaian kenaikan sebesar 36,70%.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah maka pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan alokasi belanja daerah agar bisa menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun eksentifikasi. Pemerintah daerah juga harus terus berupaya menarik Dana Alokasi Umum untuk dialokasikan pada sektor publik agar penggunaannya menjadi efisien dan menjadi penerimaan daerah. Agar penggunaan belanja daerah lebih produktif maka pemerintah daerah sebaliknya lebih transparan dalam mempergunakan belanja daerah tersebut sehingga memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan tengah dan Kalimantan tengah memiliki sumber daya alam yang begitu luas maka untuk pemerintah dianjurkan untuk mengelolanya dengan benar dan libatkan masyarakat untuk kemajuan bersama sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

DAFTAR REFERENSI

Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 26–35. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23451.20.01.2019>

Faroh Ladayya, Dian Handayani, Devi Eka Wardani Meganingtyas, Ishmah Azzah Kameela, Adine Ihsan Kamil, & Zikri Muhammad Madani. (2023). Pelatihan Analisis One-Way

Anova dalam Rangka peningkatan Kualitas Penelitian Guru di Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. *Mitra Teras: Jurnal Terapan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 32–41. <https://doi.org/10.58797/teras.0202.03>

Fitry Oetary. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara*, 4(11), 8–13.

Gulo, H., Fitrawaty, F., & Arwansyah, A. (2023). Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 59–73. <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13725>

Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Modal. *Kinerja*, 14(2), 85–91.

Hermawan, P. Y., Tiawon, H., & Neneng, S. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Bagi Hasil , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah The Effect of Regional Original Income , Revenue Sharing Funds , General Allocation Funds and Specia*.

Jefri Alfin Sinaga, Elidawaty Purba, & Pawer Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 40–48. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.350>

Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>

Mawarni, Darwanis, & Syukriy, A. (2013). Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2*, (November 2019), 80–90.

Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>

Pradita, R. R. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1–28.

Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3, 863–877.

Putra, D., & Dwirandara. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 811–827.

Rieuwpassa, A. R., Mangantar, M., & Maramis, J. B. (2021). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah di Tiga Kota di Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Tomohon). *Jurnal EMBA*, 9(1), 378–385.

Riviando, A., & Henri Agustin. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera

Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1>

Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3), 237. <https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19083>

Saddiyah, P., & Valeriani, D. (2020). Komparasi Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Belanja Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 37–46. <https://doi.org/10.33019/equity.v8i1.12>

Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, 12(1), 88–99.

Talangamin, O. B., Kindangen, P. ., & Koleangan, R. A. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7). <https://doi.org/10.35794/jpekd.19897.19.7.2018>

Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27–36. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609>